

# PARLEMENTARIA

**KETUA**  
Tingkatkan  
Vaksinasi  
Kelompok  
Rentan

## Dukung Aceh Berantas Narkotika

**KORKESRA**  
Terjun Langsung  
Perjuangkan  
Sekolah Rakyat dan  
UMKM

Nomor 1367/V/X/2025 Oktober 2025



9 772614 339005



# Dukung Aceh Berantas Narkotika



FOTO: EKO/ANNA

Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun bersama jajaran aparat penegak hukum memusnahkan barang bukti hasil sitaan narkotika di Banda Aceh, Senin (6/10/2025).

**K**omisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh untuk memantau kinerja aparat penegak hukum, sekaligus menyerap aspirasi dan masukan terkait penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan narkotika dan pembaruan hukum acara pidana. Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun mengapresiasi jajaran aparat hukum di Aceh yang dinilai berhasil menjaga stabilitas keamanan serta menunjukkan kinerja yang solid dalam penanganan kasus narkotika.

“Saya ingin memberikan apresiasi kepada Kapolda Aceh, Kajati Aceh, BNN Daerah, dan para akademisi yang telah hadir memberikan masukan penting. Tadi kita lihat ada kegiatan pemusnahan hasil sitaan narkotika dengan jumlah yang cukup besar, dan itu sangat

membanggakan,” ujar Adang di saat kunjungan di Banda Aceh, Aceh, Senin (6/10).

Adang menyebut, kinerja aparat di Aceh menunjukkan sinergi yang kuat antara kepolisian,

kejaksaan, dan BNN dalam menangani kejahatan narkotika. “Dari Kapolda saya lihat begitu sukses melaksanakan tugasnya dalam konteks pengamanan dan pelayanan. Dari kejaksaan juga penyelesaian perkara sangat bagus. BNN Daerah bekerja sama dengan kepolisian daerah juga memberikan masukan dan kerja sama yang baik,” lanjutnya.

Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN), Provinsi Aceh termasuk dalam lima besar wilayah dengan jumlah penyitaan narkotika terbesar di Indonesia. Pada semester I tahun 2025 saja, aparat gabungan di Aceh berhasil menggagalkan penyelundupan sabu seberat lebih dari 250 kilogram yang masuk melalui jalur laut dari Malaysia.

Adang menekankan pentingnya peningkatan dukungan anggaran bagi aparat penegak hukum di wilayah perbatasan seperti Aceh. “Yang pasti dukungan anggaran harus semakin baik. Kita juga melihat beberapa titik rawan masuknya narkoba dari negara tetangga, ini harus menjadi perhatian, terutama bagi Polair yang perlu dibantu oleh TNI AL dan kekuatan lainnya,” tegas mantan Wakapolri itu. — **ssb/rdn**



Scan QR untuk berita selengkapnya



# Tingkatkan Vaksinasi Kelompok Rentan



FOTO: JAKAYVEL

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani.

**K**etua DPR RI Puan Maharani menyoroti lonjakan kasus Influenza A yang tengah terjadi di Indonesia.

Menurutnya, peningkatan kasus ini bukan hanya menjadi indikator risiko kesehatan yang meningkat, tetapi juga peringatan penting agar pemerintah segera memperkuat sistem kesehatan nasional secara menyeluruh.

“Lonjakan kasus Influenza A ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh lengah. Jika tidak ditangani serius, ini bisa membebani fasilitas kesehatan dan mengancam keselamatan masyarakat secara luas,” ujar Puan di Jakarta, Senin (20/10).

Seperti diketahui, Kemenkes mengingatkan masyarakat potensi lonjakan kasus influenza

A, khususnya subtype H3N2, yang kini mulai mendominasi di kawasan Asia Tenggara. Mengutip data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melalui sistem FluNet, Kemenkes menyatakan sebagian besar kasus influenza di Indonesia terkait dengan varian H3N2.

Tren peningkatan kasus influenza A juga terlihat di negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand yang didominasi virus influenza tipe A. Kasus influenza A, khususnya subtype H3N2 kini dilaporkan mendominasi di kawasan Asia Tenggara. Salah satu lonjakan terbesar terjadi di Thailand, dengan 61 kematian dari 702.308 kasus sejak 1 Januari hingga 8 Oktober 2025.



**PENGAWAS UMUM**

Pimpinan DPR RI

**KETUA PENGARAH**

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

**WAKIL PENGARAH**

Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

**PIMPINAN PELAKSANA**

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si. (Karo Pemberitaan Parlemen)

**PIMPINAN REDAKSI**

M. Ibnurkhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

**WAKIL PIMPINAN REDAKSI**

Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)

Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analists Media)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

**REDAKTUR**

Agung Hidayat, S.I.P., Ridwan Budiman, S.I.P., Muhammad Husen

**REDAKTUR FOTO**

M. Andri Nurdiansyah

**SEKRETARIS REDAKSI**

Prima Danutirto, A.Md,

Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

**ANGGOTA REDAKSI**

Tiara Saum, S.I.Kom., Hira Askamal, S.I.Kom., Bianca Destianti, S.I.Kom., Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom., Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom., Nadhen Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom., Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrullu, Purnito Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonaricha Firsta Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien, Yasmin Nabila

**FOTOGRAFER**

Naefuroji, Jaka Nugraha, Rumi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu Afhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen, Moh Farhan Nur Fikri, Mario Fernandez

**INFOGRAFIS**

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulla, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

**ADMINISTRASI**

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

**PENERBITAN**

**PIMPINAN PENERBITAN**

Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

**PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**

Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

**DESAIN GRAFIS**

Dito Sugito, Insan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom.

**IT MEDIA DIGITAL**

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E.

Indah Ekawati, S.I.Kom.

**PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI**

M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)

Adi Ardiansyah, M.M.

**KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**

Zulfikar, S.A.B.

**ADMINISTRASI**

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrissa Dwipa

Telp. 021-571 5697

Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO  
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK  
PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya



# Terjun Langsung Perjuangkan Sekolah Rakyat dan UMKM



FOTO: IST/VEL

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal saat memberikan bantuan pada warga dalam kegiatan reses di Desa Cibodas, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Selasa (14/10/2025).

**W**akil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyapa dan mendengar langsung aspirasi masyarakat dalam kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun 2025 di Gedung Serbaguna Desa Cibodas, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Selasa (14/10). Bagi Cucun, momen reses bukan sekadar agenda rutin, melainkan kesempatan untuk kembali turun ke bumi dan mendengar langsung denyut kehidupan masyarakat di daerah pemilihannya, Jawa Barat II, yang meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.

“Aspirasi masyarakat luar biasa, banyak yang disampaikan, mulai dari masalah BPJS, UMKM, hingga

infrastruktur jalan,” ujar Cucun dalam keterangan rilisnya yang diterima **Parlementaria**, Rabu (15/10).

Sejumlah persoalan yang mencuat dalam dialog tersebut terasa begitu dekat dengan keseharian masyarakat. Mulai dari tunggakan iuran BPJS non-pemerintah, keterlambatan bantuan sosial, hingga kondisi jalan di wilayah selatan Bandung yang memerlukan perbaikan.

Politisi Fraksi PKB ini menegaskan, seluruh aspirasi itu akan dibawanya ke tingkat pusat untuk dicarikan solusi. “Kami di PKB selalu menekankan bahwa kehadiran wakil rakyat tidak hanya lima tahun sekali. Harus selalu ada di tengah-tengah masyarakat untuk mendengar dan

menyampaikan aspirasi mereka,” tegasnya.

Dalam pertemuan itu, Cucun juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat dalam mengatasi persoalan masyarakat. Salah satunya terkait program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Namun di balik seluruh program pemerintah, Cucun mengingatkan agar semangat gotong royong tetap dijaga. Menurutnya, nilai-nilai kebersamaan itu merupakan modal sosial yang telah mengakar di masyarakat Indonesia. “Walaupun kita hidup di era semua serba dibiayai negara, jangan sampai nilai gotong royong hilang. Ini modal sosial kita yang harus dijaga,” pesannya. **gal/aha**



Scan QR untuk berita selengkapnya

# Waspadaai Iming-Iming Kerja ke LN Non Prosedural



FOTO: TONDA/ANDRI

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal saat mengunjungi Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang kerap kali menjadi wilayah penyumbang pekerja migran, khususnya di daerah Gunung Alu, Sinangkerta, dan Cipongkor, pada Senin (6/10/2025).

**W**akil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap berbagai tawaran kerja ke luar negeri yang tidak melalui jalur resmi. Ia menilai pemerintah telah menyiapkan skema perlindungan dan pembiayaan bagi pekerja migran, sehingga masyarakat tidak perlu lagi bergantung pada praktik perekrutan ilegal.

Hal tersebut disampaikan Cucun saat mengunjungi Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang kerap kali menjadi wilayah penyumbang pekerja migran, khususnya di daerah Gunung Alu, Sinangkerta, dan Cipongkor, pada Senin (6/10). Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya sosialisasi

mengenai keamanan dan prosedur pemberangkatan pekerja migran.

“Hari ini saya datang ke wilayah yang banyak menjadi kontributor pekerja migran. Ini adalah wilayah Bandung Barat di selatan, Gunung Alu, Sinangkerta, Cipongkor, yang dulu hampir banyak di

negara-negara Timur Tengah. Tapi sekarang sudah mulai bergeser dan banyak menerima sosialisasi, tidak mengambil di Timur Tengah tetapi di wilayah Asia yang ramah dengan migran,” ujar Cucun kepada Parlementaria di sela-sela kunjungan.

Politisi Fraksi PKB ini juga mengingatkan masyarakat untuk tidak tergiur dengan janji-janji manis yang kerap menjadi pintu masuk praktik penipuan terhadap calon pekerja migran. Lebih lanjut, Cucun menyoroti praktik pungutan liar yang kerap terjadi dalam proses pemberangkatan. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk meringankan beban calon pekerja migran dan keluarganya.

“Jangan sampai mereka itu sebetulnya bisa skemanya banyak. Jangan misalkan sekarang dipungutin, uangnya diminta bayaran sekian-sekian, kemudian nanti dengan beban pengembalian yang banyak. Padahal negara sudah hadir melalui skema KUR, nanti kita akan bantu skema KUR-nya untuk para pekerja migran, nanti bisa bagaimana mereka juga mengembalikan uang yang bekas mereka berangkat ini, tidak menjadi beban buat keluarganya. Negara sudah siapkan perangkat semuanya,” tegas wakil rakyat dari Dapil Jawa Barat II ini. **fr/rdn**



Scan QR untuk berita selengkapnyanya

# Infrastruktur Pangan Jadi Penentu Nasib Petani



FOTO: SAUM/VEL

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dalam agenda peninjauan lapangan gabungan DPR ke Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (15/10/2025).

**W**akil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan bahwa infrastruktur pertanian berperan krusial menentukan kesejahteraan petani dan stabilitas harga pangan nasional. Menurutnya, persoalan utama yang dihadapi para petani bukan hanya soal produksi, melainkan biaya distribusi yang tinggi akibat buruknya akses jalan dan irigasi dari hulu hingga hilir.

“Kalau jalannya rusak, ongkos angkut jadi mahal. Akibatnya harga di tingkat petani jatuh, tapi harga di pasar naik. Jadi infrastruktur bukan sekadar jalan, tapi penentu nasib petani dan harga pangan,” ujar Saan di sela-sela agenda peninjauan lapangan gabungan DPR ke

Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (15/10).

Saan mencontohkan kondisi di sejumlah wilayah lumbung pangan seperti Banyuasin, Ogan Komering Ilir, dan Musi Banyuasin yang kerap menghadapi tantangan biaya logistik tinggi. Mobil pengangkut gabah atau beras, paparnya, seharusnya bisa bolak-balik sepuluh kali dalam sehari tetapi kondisi jalan yang rusak parah, membuat frekuensi itu menurun hingga setengahnya.

Menurut data Kementerian Pertanian 2025, biaya logistik sektor pertanian di Indonesia masih menyumbang hingga 25–30 persen dari total biaya produksi. Angka itu jauh lebih tinggi dibanding negara-negara

ASEAN lain seperti Thailand dan Vietnam yang rata-rata hanya 10–15 persen. Di sisi lain, Kementerian PU mencatat masih ada sekitar 43 persen jalan produksi pertanian di Indonesia masih dalam kondisi rusak ringan hingga berat, termasuk di sejumlah daerah penghasil beras di Sumatera Selatan.

Oleh karena itu, Saan menekankan, infrastruktur pertanian tidak bisa dilihat hanya sebatas proyek pembangunan jalan, melainkan bagian dari sistem ketahanan pangan nasional. Berangkat dari temuan ini, DPR bersama pemerintah akan memperkuat sinergi lintas kementerian untuk memastikan konektivitas antara lahan, sentra produksi, dan pasar berjalan efektif.

**um/aha**



# Perhatikan Kesejahteraan Babinsa

**A**nggota Komisi I DPR RI, Desy Ratnasari, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja seluruh jajaran Kodam V/Brawijaya, khususnya prajurit yang bertugas di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Ia menilai, gerak cepat dan sinergi TNI dalam mendukung program-program pemerintah merupakan wujud nyata pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Saya sangat mengapresiasi gerak cepat Kodam V/Brawijaya dalam mendukung berbagai program pemerintah. Jika kinerja TNI prima, maka pengelolaan dan kesejahteraan prajuritnya juga harus prima. Sebab, dari sanalah lahir kinerja terbaik yang memberi manfaat bagi masyarakat dan yang terpenting menjaga kedaulatan dan keamanan negara,” ujar Desy saat Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI di Kodam V/Brawijaya, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Rabu (8/10).

Politisi Fraksi PAN tersebut menyoroti peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) sebagai ujung

tombak TNI yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan Babinsa, termasuk tunjangan kinerja, menjadi hal yang sangat penting mengingat kontribusi mereka dalam berbagai program sosial di daerah.

“Babinsa terlibat langsung dalam banyak program pemerintah, seperti pendataan penerima Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) maupun

pendampingan kelompok tani (Poktan). Bahkan Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah, menyampaikan apresiasi atas data akurat yang diberikan TNI, dan saya yakin ujungnya adalah kerja keras para Babinsa di lapangan,” jelasnya.

Selain itu, Desy juga menyoroti pentingnya kesetaraan gender dalam lingkungan TNI. Ia mendorong agar proses rekrutmen, promosi, dan rotasi jabatan di tubuh TNI juga terbuka bagi perempuan di semua mata. **mfn/aha**

Anggota Komisi I DPR RI, Desy Ratnasari, dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI di Kodam V/Brawijaya, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Rabu (8/10/2025).



Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya



FOTO: FARHAN/VEL

# Sinkronkan Pengelolaan Fiskal Pusat-Daerah

**A**nggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli meminta pemerintah pusat segera melakukan sinkronisasi kebijakan fiskal dengan pemerintah daerah, menyusul temuan Kementerian Keuangan terkait dana daerah mengendap mencapai Rp234 triliun di perbankan. Hal ini disampaikan Doli dalam agenda Dialektika Demokrasi di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/10).

Doli menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan anggaran pusat dan pelaksanaan keuangan daerah. Padahal,

**Ironinya, di satu sisi kepala daerah banyak mengeluh kekurangan anggaran, tetapi di sisi lain justru ada Rp234 triliun yang tidak terserap**

menurutnya, pemerintah pusat telah menggelontorkan dana transfer yang besar setiap tahun untuk mendukung pembangunan di berbagai daerah.

“Ironinya, di satu sisi kepala daerah banyak mengeluh kekurangan anggaran, tetapi di sisi lain justru ada Rp234 triliun yang tidak terserap. Ini

harus disinkronkan, dudukkan persoalannya secara terbuka,” ujar Doli.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menegaskan, DPR mendorong agar Kementerian Keuangan bersama Kementerian Dalam Negeri segera melakukan rapat koordinasi nasional dengan para kepala daerah untuk mengklarifikasi penyebab penumpukan anggaran tersebut. Menurutnya, langkah ini penting untuk mencegah salah tafsir publik serta menjaga stabilitas fiskal nasional.

“Kalau tidak segera dijelaskan, bisa menimbulkan tafsir lain dan mengganggu kepercayaan publik terhadap sistem keuangan negara. Ini bukan hanya soal teknis, tapi menyangkut kepercayaan pada tata kelola pemerintahan,” katanya.

Lebih lanjut, Doli menyebut DPR memahami langkah pemerintah pusat yang mengurangi alokasi dana transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026. Namun, kebijakan itu harus dibarengi dengan evaluasi dan komunikasi terbuka agar tidak mengganggu pelayanan publik di daerah. **fa/aha**



FOTO: RUMI/VEL



Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli dalam agenda Dialektika Demokrasi secara virtual di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

# Lindungi Hak Warga atas Superioritas Negara



Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam RDPU bersama Aliansi Mahasiswa Nusantara yang diselenggarakan di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

**K**omisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Aliansi Mahasiswa Nusantara yang diselenggarakan di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/10). RDPU tersebut dalam rangka menyerap aspirasi mengenai substansi revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai upaya memperkuat perlindungan hak warga negara dalam proses hukum dan mengurangi dominasi “*superpower* negara” yang selama ini dirasakan masyarakat.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai KUHAP saat ini masih belum mencerminkan keseimbangan antara kewenangan negara dan hak warga negara. “Jadi

memang KUHAP ini mengatur relasi antara negara dengan warga negara yang bermasalah dengan hukum. Selama ini kan tidak *fair*, tidak *balance*,” ujarnya dalam forum tersebut.

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa salah satu poin penting dalam revisi KUHAP adalah penguatan hak tersangka, saksi, dan pendamping hukum sejak awal proses pemeriksaan. Selama ini, hak pendampingan hukum baru muncul setelah seseorang ditetapkan sebagai tersangka.

Salah satu langkah konkret yang akan dimasukkan ke dalam revisi KUHAP terkait hak warga adalah pemasangan CCTV di ruang pemeriksaan. Menurutnya, hal ini dapat menciptakan proses hukum yang lebih transparan,

akuntabel, dan meminimalisasi praktik intimidasi.

“Negaranya *super power*, warga negaranya sama sekali tidak *ber-power*. Jadi orang yang bermasalah itu ya sudah salah tidak salah ya kemungkinan besar masuk penjara nantinya gitu kan,” tutur Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Dalam forum tersebut, mahasiswa dari Aceh menyampaikan praktik *restorative justice* yang telah dijalankan di daerah mereka melalui qanun jinayah. Sebanyak 18 bentuk pidana ringan diselesaikan dengan pendekatan kekeluargaan tanpa harus melalui jalur pengadilan. Praktik ini dinilai sejalan dengan semangat revisi KUHAP yang ingin mendorong keadilan substantif dan mengurangi beban perkara pidana.

**fr/rdn**



Scan QR untuk berita selengkapnya

# Bantuan untuk Petani dan Peternak Cianjur Selatan

**A**nggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari, kembali menunjukkan komitmennya terhadap kemajuan sektor pertanian dan peternakan. Dalam kegiatan reses dan penyaluran aspirasi Tahun Anggaran 2025, secara simbolis, ia menyerahkan bantuan hampir Rp2,5 miliar bagi para petani dan peternak di berbagai wilayah Cianjur Selatan, Jawa Barat.

Bantuan tersebut merupakan hasil kolaborasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) melalui program aspirasi Komisi IV DPR RI. Jenis bantuan yang diberikan meliputi alat mesin pertanian (alsintan), program ayam petelur, bibit kopi, bangsal pascapanen, serta program pangan bergizi yang disalurkan langsung kepada kelompok tani penerima manfaat di lapangan.

**Setiap kunjungan dilakukan, kami bersama jajaran penyuluh pertanian dan aparat desa setempat, sekaligus berdialog langsung dengan kelompok tani untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran**

Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari menyerahkan secara simbolis bantuan program ayam petelur kepada kelompok tani di Cianjur Selatan, Jawa Barat.

Kegiatan reses ini mencakup sejumlah titik di antaranya Kecamatan Cibinong, Pasirkuda, Pagelaran, Campaka, dan Campakamulya, dengan total nilai bantuan mencapai Rp2.498.100.000. “Setiap kunjungan dilakukan, kami bersama jajaran penyuluh pertanian dan aparat desa setempat, sekaligus berdialog langsung dengan kelompok tani untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran,” ujar Endang dalam keterangan tertulis yang diterima **Parlementaria**, di Jakarta, Sabtu (18/10).

Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Desa Sukajadi, Kecamatan Cibinong, tempat penyaluran program ayam petelur senilai Rp191.000.000 serta bantuan alsintan berupa traktor roda empat, pompa air, dan *handsprayer* dengan total nilai Rp393.600.000. Selain itu, di Kecamatan Pagelaran, beberapa kelompok tani seperti Poktan Pasir Munding, Poktan Pamoyanan, dan Poktan Bojongsari juga menerima bantuan dengan total Rp923.400.000. — hal/rdn



Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya

FOTO: IST/VEL

# Kaji Ulang Pembengkakan Biaya KCIC!

**A**nggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu, menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). Adian menilai penolakan tersebut perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas, yakni adanya dugaan pembengkakan biaya yang perlu dikaji secara serius.

“Kalau menurut saya, memang seharusnya dikaji ulang bagaimana bisa terjadi pembengkakan biaya untuk kereta cepat itu,” ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini dalam keterangan video yang dikutip **Parlementaria**, di Jakarta, Senin (20/10).

Ia menekankan bahwa proyek serupa tidak hanya dibangun di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain dengan teknologi yang berbeda, seperti produksi dari Cina maupun Jepang. Legislator Dapil Jawa Barat V itu menilai, sikap Menteri Keuangan menolak pembayaran utang proyek menggunakan APBN tentu memiliki alasan tersendiri. Namun demikian, Adian menilai hal ini tidak menghapus kewajiban pemerintah untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap manajemen proyek tersebut.

Terkait wacana perpanjangan rute Kereta Cepat hingga Jakarta–Surabaya, Adian menilai ide tersebut baik, namun harus diimbangi dengan perencanaan



FOTO: OJI/VEL

Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu.

**Sikap Menteri Keuangan menolak pembayaran utang proyek menggunakan APBN tentu memiliki alasan tersendiri. Namun demikian, Adian menilai hal ini tidak menghapus kewajiban pemerintah untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap manajemen proyek tersebut.**

dan pelaksanaan yang matang. Lebih lanjut, Adian menyoroti bahwa hampir setiap proyek besar di Indonesia kerap mengalami pembengkakan biaya. Ia pun menegaskan bahwa jika proyek ini pada akhirnya menggunakan APBN, maka pemerintah harus menjelaskan evaluasi yang telah dilakukan.

“Kalau sampai menggunakan APBN, berarti ini kan mengkhianati janji awal. Maka yang harus dipikirkan, siapa yang melakukan negosiasi, berapa harga yang patut, dan apakah perjanjian itu dibuat dengan niat baik,” ujarnya.

**we/rdn**

Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya



# Bahas Potensi Kerja Sama Ekonomi dengan Duta Besar Rumania

**K**etua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, menerima kunjungan Duta Besar Rumania untuk Republik Indonesia, Dan-Adrian Bălănescu, di Ruang Delegasi DPR RI, Selasa, (14/10). Pertemuan ini menjadi momentum awal untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Rumania, khususnya di sektor ekonomi, perdagangan, dan investasi.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai peluang kerja sama yang diharapkan

dapat membuka jalan bagi kolaborasi strategis antara kedua negara. Ketua Komisi VI DPR RI menyampaikan bahwa hubungan Indonesia dan Rumania selama ini memang belum begitu intens, namun memiliki ruang luas untuk diperluas, terutama di sektor ekonomi riil dan investasi antar-BUMN.

“Sebenarnya Indonesia dan Rumania belum begitu banyak menjalin kerja sama. Karena itu, pertemuan hari ini menjadi penting agar setelah ini ada langkah-langkah konkret dan kerja sama yang lebih besar lagi,” ujar Anggia.

Salah satu sektor yang menjadi fokus pembahasan adalah pangan dan pertanian. Rumania, yang merupakan salah satu negara penghasil gandum terbesar di Eropa, menawarkan peluang ekspor produk gandumnya ke Indonesia. Sementara itu, Indonesia memiliki potensi ekspor beras ke Eropa seiring meningkatnya tren konsumsi nasi di kawasan tersebut. Pertukaran komoditas ini dinilai dapat memperkuat ketahanan pangan kedua negara serta membuka pasar baru bagi pelaku usaha di masing-masing negara.

Dubes Rumania juga mengundang partisipasi Indonesia dalam ekspo pertanian berskala global yang akan digelar di negaranya. Melalui ekspo tersebut, Indonesia diharapkan dapat menampilkan berbagai produk unggulan dari BUMN pangan, sektor swasta, serta kementerian terkait. Kesempatan ini juga menjadi ajang promosi untuk menunjukkan keunggulan produk pertanian Indonesia di kancah internasional.

bit/aha



FOTO: FARHAN/ANDRI

Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, menerima kunjungan Duta Besar Rumania untuk Republik Indonesia, Dan-Adrian Bălănescu, di Ruang Delegasi DPR RI, Selasa, (14/10/2025).



Scan QR untuk berita selengkapnya

# Humas Pesantren Harus Manfaatkan Perkembangan Teknologi

**A**nggota DPR RI Komisi VIII, Sudian Noor mengungkapkan bahwa media sosial dan *platform* digital lainnya bisa dijadikan media atau sarana dakwah dan pendidikan Islam yang relevan dengan generasi masa kini.

“Pemuda Islam harus melek teknologi. Dakwah dan pendidikan kini harus berjalan seiring dengan kemajuan zaman. Salah satunya lewat media sosial dan *platform* digital. Dan Program Pesantren Go Digital ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran humas pesantren agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital,” ujar Sudian saat menggelar Program Pesantren *Go Digital* di Masjid Ar-Raudhah, Wardatul Arsyad, Kecamatan Simpang Empat, Kalimantan Selatan, beberapa waktu lalu.

Dalam masa resesnya itu, Politisi dari Fraksi PAN ini mendukung penuh upaya digitalisasi pesantren. Bahkan menurutnya Masjid pun dapat digunakan sebagai pusat peradaban dan inovasi umat, selain tentunya yang utama sebagai tempat ibadah. “Masjid selain sebagai tempat ibadah, juga bisa menjadi pusat inovasi dan penggerak ekonomi kreatif jika teknologi dimanfaatkan secara

produktif oleh generasi muda,” tambah wakil rakyat dari Dapil Kalimantan Selatan II yang meliputi Kab. Kotabaru, Kab. Tanah Bumbu, Kab. Tanah Laut, Kota Banjarbaru, dan Kota Banjarmasin itu.

Oleh karenanya, ia berharap pesantren dan masjid mampu menjadi motor penggerak perubahan sosial yang positif, sekaligus pusat pemberdayaan masyarakat, wadah penguatan karakter dan kreativitas umat di era digital. Tidak hanya itu, melalui

program Pesantren *Go Digital* ini, juga diharapkan lahir generasi muda Islam yang cakap digital, kreatif, dan berakhlak mulia.

Dalam kesempatan yang sama, hadir juga Anggy Firmansyah dari gerakan Masjid Sejuta Pemuda sebagai narasumber yang turut memberikan motivasi kepada peserta. Ia mengajak santri dan pegiat dakwah untuk terus berinovasi dalam mengemas pesan keislaman agar lebih menarik di era digital. — **ayu/rdn**



Anggota Komisi VIII DPR RI  
Sudian Noor.



# Tingkatkan Profesionalisme Penyelenggaraan Haji

**A**nggota Komisi VIII DPR RI Sudian Noor mendesak Kementerian Haji dan Umrah untuk meningkatkan profesionalisme serta transparansi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ia menilai, hingga kini belum tampak perubahan signifikan dalam tata kelola kementerian tersebut dibandingkan saat masih dikelola oleh Kementerian Agama sebelumnya.

“Kita di sini ingin mengingatkan kembali tujuan Kementerian Haji dan Umrah yang dibentuk ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme dalam penyelenggaraan ibadah haji dan

umrah, (agar) lebih fokus, lebih efisien, dan terintegrasi,” ujar Sudian dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Haji dan Umrah di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/10).

Selain kurangnya profesionalisme, Sudian juga

menyoroti beberapa masalah yang sering muncul di Kementerian Agama sebelumnya, seperti isu penurunan biaya haji, temuan-temuan mencurigakan, hingga kebocoran-kebocoran anggaran.

“Kita juga belum melihat disini, seperti Pak Presiden menginginkan dengan adanya kampung haji, otomatis biaya haji juga nanti akan murah. Saya belum melihat di Kementerian Haji ini untuk sentralisasi seperti kampung haji,” ungkapnya.

Politisi Fraksi PAN tersebut menegaskan bahwa konsep Kampung Haji penting sebagai upaya sentralisasi layanan haji yang dapat menekan biaya sekaligus meningkatkan efisiensi penyelenggaraan. Ia menilai pelaksanaan haji sebelumnya terlalu banyak melibatkan sektor sehingga menyulitkan pengawasan di lapangan dan membuat petugas kesulitan menjalankan tugas.

“Saya meminta apa yang dipaparkan lebih rinci supaya kita bisa mengoreksi sama-sama. Terutama saya belum melihat hotel-hotel yang dipakai di mana. Kalau masih sama saja seperti tahun kemarin berarti tidak ada kemajuan,” tegas Sudian. — **ecd, gal/rdn**

Anggota Komisi VIII DPR RI Sudian Noor dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Haji dan Umrah di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/10/2025).

FOTO: MUNCHEN/ANDRI



# Perbaiki Kualitas Sanitasi MBG Banjarmasin

**A**nggota Komisi IX DPR RI Mariana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan program MBG harus berdampak kepada penerima masyarakat, tak hanya mengenyangkan tetapi dapat mencetak penerus bangsa yang sehat dan cerdas.

Sidak dimulai di SPPG Yayasan Cahaya Bumi Borneo, dilanjutkan ke Yayasan Olivia Sandra Mandiri. Dalam kunjungannya, Politisi Fraksi Partai Gerindra itu secara langsung memantau seluruh tahapan proses, mulai dari pemilihan bahan baku, sanitasi dapur, hingga pengemasan

dan distribusi makanan, Jumat (17/10).

“Kebersihan dan kualitas gizi adalah harga mati. Kita tidak boleh kompromi soal makanan anak. Program ini harus jadi jaminan bahwa mereka tidak hanya kenyang, tapi juga sehat dan cerdas,” tegasnya dalam keterangan rilis yang diterima **Parlementaria**, Jumat (17/10).

Ia juga menyoroti pentingnya penerapan protokol ketat di dapur, untuk menghindari risiko

kontaminasi dan keracunan makanan. Standar sanitasi menjadi perhatian utama dalam tinjauan tersebut. Setelah memeriksa dapur produksi, Ia mengunjungi SDN Pasar Lama 3 untuk melihat langsung bagaimana makanan didistribusikan dan diterima oleh siswa.

“Kami ingin lihat langsung, apakah makanan yang disiapkan betul-betul sampai ke anak-anak dengan layak, bergizi, dan sesuai selera mereka. Sekolah adalah ujung tombak dampak program ini,” katanya.

Menutup kegiatan sidak, Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menyampaikan apresiasi kepada para mitra SPPG dan menekankan pentingnya sinergi antara DPR, pemerintah, dan penyedia layanan di lapangan. “Kolaborasi adalah kunci. Jika semua pihak bekerja serius, Program MBG bisa menjadi fondasi lahirnya Generasi Emas Indonesia — anak-anak yang sehat, cerdas, dan berdaya saing,” tutupnya. **gal/rdn**

Anggota Komisi IX DPR RI  
Mariana



Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya



# Pesantren Setara dalam Revisi UU Sisdiknas

**W**akil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian menilai viralnya pemberitaan terkait pesantren dalam program 'Xpose Uncensored' yang ditayangkan salah satu televisi nasional menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa bangsa Indonesia perlu kembali belajar adab dan moral dari lingkungan pesantren. Ia juga menegaskan pentingnya menjaga marwah pondok pesantren sekaligus memastikan kesetaraan hak pendidikan pesantren dengan lembaga pendidikan umum lainnya yang didorong dengan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

"Pesantren adalah tempat di mana nilai-nilai ke-Indonesiaan, gotong royong, hormat kepada guru, dan ketulusan hati masih hidup serta terus dijaga. Di pesantren inilah lahir para pejuang, para ulama, dan negarawan yang menjaga negeri ini dengan doa dan pengertian," ujarnya dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk 'Antara Tradisi dan Modernitas: Mampukah Pesantren Bertahan di Tengah Gempuran Globalisasi?' yang digelar oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Kamis (16/10).

Menurut Lalu Hadrian, menjaga marwah pesantren bukan

sekadar membela satu lembaga, melainkan juga menyembuhkan luka moral bangsa dan negara Indonesia. Dalam momentum revisi Undang-Undang Sisdiknas, ia berkomitmen memperjuangkan

**Pesantren adalah tempat di mana nilai-nilai ke-Indonesiaan, gotong royong, hormat kepada guru, dan ketulusan hati masih hidup serta terus dijaga.**

pengakuan yang lebih jelas terhadap posisi pendidikan pesantren agar diakui setara oleh negara. Ia juga mendorong Kementerian Pendidikan untuk mengadopsi nilai-nilai pendidikan karakter khas pesantren ke dalam kurikulum nasional.

"Saya berharap kepada seluruh pemangku kebijakan dan seluruh stakeholder pendidikan untuk bersama-sama menjaga serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan," pungkasnya.

— ecd,gal/rdn

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian.



Scan QR untuk berita selengkapnya



FOTO: MENTARI/VEL

# Ajak UMKM Manfaatkan Katalog Elektronik



FOTO: IST/VEL

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin

**S**eiring pemanfaatan Katalog Elektronik (E-Katalog), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mencatat pengadaan barang dan jasa pemerintah mencapai efisiensi rata-rata sebesar 17,11 persen, atau setara dengan lebih dari Rp30 triliun per tahun. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mengapresiasi sekaligus mengajak UMKM memanfaatkan E-Katalog.

“Tentunya, saya mendukung inovasi ini. Tapi, saya berpesan agar transisi peralihan sistem ini harus dipastikan berjalan mulus untuk memudahkan bagi pengusaha mikro kecil dan koperasi. Karenanya, saya mengajak pengusaha mikro kecil dan koperasi untuk bisa memanfaatkan

sistem ini agar nantinya produk yang dimiliki bisa diserap dalam belanja pemerintah,” ungkap Puteri dalam kegiatan Diseminasi Kebijakan Penyelenggaraan Katalog Elektronik Versi 6 Kepada Pelaku Usaha di Kabupaten Bekasi, seperti keterangan yang diperoleh **Parlementaria**, Senin (13/10).

Menurut LKPP, saat ini sudah ada 18,9 juta produk tayang dengan transaksi sebesar Rp 56,03 triliun di E-Katalog. Pada kesempatan ini, Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Iwan Herniawan menjelaskan penerapan E-Katalog LKPP ini sebagai salah bentuk transformasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan transparansi dalam pengelolaan keuangan

negara, reformasi pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar lagi. Jadi tadi, transformasinya lengkap, mulai dari transformasi regulasi dan kemudian juga transformasi teknologi melalui digitalisasi pengadaan,” ucap Iwan.

Pada kesempatan yang sama, PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Ida Farida, mengungkapkan Pemerintah Kabupaten Bekasi terus mendukung penerapan E-Katalog di lingkungan Kabupaten Bekasi. “Pemerintah Kabupaten Bekasi pada 2 tahun kebelakang melalui Peraturan Bupati Bekasi, ini ada namanya program Bekasi Berani Beli. Jadi, mereka sudah masuk di E-Katalog, yang kurang lebih di tahun 2024 kegiatan transaksinya ini mencapai Rp100 miliar,” ujar Ida.

**rnm/aha**



Scan QR untuk berita selengkapnya

# Penerapan Bioetanol Harus Berbasis Riset Ilmiah

**W**akil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menegaskan pentingnya kajian komprehensif terhadap kebijakan pemanfaatan bioetanol sebagai campuran bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia. Menurutnya, penerapan bioetanol harus dilakukan secara hati-hati dan berbasis riset ilmiah yang terbukti aman, mengingat kebijakan ini menyangkut hajat hidup masyarakat luas dan berbagai sektor strategis nasional.

“Karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan banyak pemangku kepentingan, pemanfaatan etanol sebagai campuran BBM harus melalui proses yang betul-betul proven, melalui kajian tertentu. Etanol ini memiliki sifat kimia yang spesifik, salah satunya bersifat korosif,” ujar Sugeng saat wawancara langsung kepada **Parlementaria**, di Jakarta, Jumat (17/10).

Lebih lanjut, Sugeng menjelaskan bahwa sejumlah negara di dunia telah berhasil memanfaatkan bioetanol sebagai campuran bahan bakar kendaraan.

Indonesia pun memiliki potensi besar untuk mengembangkannya, terutama melalui sumber daya alam yang melimpah di wilayah tropis. Namun, implementasinya harus melalui penelitian dan uji coba menyeluruh agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap performa kendaraan maupun infrastruktur energi.

“Pemanfaatan bioetanol ini sebenarnya langkah yang baik, apalagi jika kita melihat dampak jangka panjangnya terhadap ekonomi dan lingkungan. Tapi harus dikaji betul secara ilmiah agar tidak menimbulkan efek teknis yang tidak diinginkan,” tambah Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Menurut Sugeng, penggunaan bioetanol dapat menjadi solusi strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang kini menimbulkan beban besar bagi perekonomian nasional. Ia memaparkan, konsumsi BBM Indonesia saat ini mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara kemampuan produksi dalam negeri hanya sekitar 600 ribu barel per hari.

“Artinya, kita masih mengimpor sekitar satu juta barel per hari, baik dalam bentuk minyak mentah maupun produk BBM jadi. Ini menjadi beban ekonomi yang terus meningkat setiap tahun dan membebani APBN kita,” jelasnya.

— bit/rdn

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto.



Scan QR untuk berita selengkapnya



FOTO: JAKA/VEL

# Korban Kejahatan Belum Tahu Peran Penting LPSK

**A**nggota Komisi XIII DPR RI, Marinus Gea, menegaskan pentingnya peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan kepada korban kejahatan. Ia menjelaskan, angka kejahatan di Indonesia terus meningkat. Berdasarkan data BPS, jumlah kasus kejahatan nasional melonjak dari 372 ribu kasus pada 2022 menjadi hampir 585 ribu kasus pada 2023.

“Artinya, dalam setiap 100 ribu penduduk, 214 orang menjadi korban tindak pidana. Angka ini tidak sekadar statistik. Di balik setiap angka, ada wajah manusia, ada ibu yang kehilangan anaknya, ada keluarga yang dirundung rasa takut, ada perempuan dan anak yang menanggung trauma karena

kekerasan seksual,” kata Marinus Gea dalam kegiatan sosialisasi LPSK yang digelar di Tangerang, Selasa (14/10).

Ia menambahkan, dari ribuan kasus tersebut, hanya sebagian kecil korban yang berani mencari perlindungan ke LPSK. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum tahu, tidak berani, atau tidak percaya bahwa negara hadir untuk melindungi mereka.

Maka dari itu, ia mendorong agar LPSK lebih dekat dengan rakyat, tidak hanya hadir di ibu kota, tetapi juga menjangkau desa-desa dan komunitas rentan. Ia mengusulkan tiga langkah konkret agar LPSK semakin dekat dengan masyarakat. Pertama, melakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban agar lebih adaptif terhadap ancaman baru, seperti kekerasan berbasis elektronik. Kedua, memastikan dukungan anggaran dari APBN yang memadai untuk memperkuat layanan LPSK, termasuk pos layanan, hotline, serta kerja sama dengan pemerintah daerah.

Terakhir, memperkuat pengawasan dan edukasi publik dengan melibatkan masyarakat secara langsung, sehingga mereka memahami hak-haknya sebagai saksi maupun korban. — rdn

Anggota Komisi XIII DPR RI,  
Marinus Gea



FOTO: AGUNG/VEL

Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya





Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera bertukar cinderamata usai menerima delegasi parlemen Arizona di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara, DPR RI, Senin (20/10/2025).

FOTO: JAKA/ANDRI

# Kantor Dagang Arizona di Indonesia: Peluang Perluasan Investasi

**K**etua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menyambut positif rencana pembukaan kantor perdagangan (*trade office*) negara bagian Arizona, Amerika Serikat, di Indonesia. Menurutnya, langkah tersebut menjadi peluang emas untuk memperkuat hubungan ekonomi, investasi, dan pendidikan antara kedua negara.

Pertemuan antara BKSAP DPR RI dan delegasi parlemen Arizona ini berlangsung hangat di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara, DPR RI, Senin (20/10). Delegasi tersebut menyampaikan komitmen untuk memperluas jejaring ekonomi melalui pendirian kantor perdagangan di Indonesia, setelah sebelumnya memiliki kantor serupa di Taiwan dan Korea Selatan.

“Kami sangat bahagia menyambut kedatangan anggota

parlemen dari negara bagian Arizona. Mereka datang dengan niat baik untuk memperkuat hubungan, bukan hanya di bidang perdagangan, tetapi juga kerja sama pendidikan dan pertambangan melalui Arizona State University dan perusahaan-perusahaan yang berbasis di sana,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.

Mardani menjelaskan bahwa Arizona memiliki potensi besar di bidang pertambangan dan energi, serta modal ekonomi yang kuat untuk dikembangkan di kawasan Asia. Rencana pembukaan kantor perdagangan di Indonesia, menurutnya, merupakan bentuk kepercayaan Arizona terhadap potensi ekonomi nasional.

“Arizona memiliki capital yang besar karena merupakan daerah tambang. Mereka ingin mengembangkan kapasitas ekonomi mereka di Asia, dan Indonesia menjadi salah satu mitra potensial,” jelas wakil rakyat dari Dapil Jakarta Timur ini. bit/rdn



# Tinjau Bulog Jambi Demi Jaga Pasokan Akhir Tahun

**A**nggota DPR RI Rocky Candra, melakukan kunjungan kerja reses ke Perum Bulog Kanwil Jambi, Selasa (14/10). Kunjungan ini dalam rangka untuk meninjau langsung kinerja dan kesiapan Bulog dalam mendukung program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) serta memastikan stabilitas pasokan pangan di Provinsi Jambi menjelang akhir tahun.

“Kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan tugas BUMN pangan strategis, sekaligus upaya memastikan program pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan pangan nasional berjalan efektif hingga tingkat daerah,” ujar Rocky dalam keterangan tertulis yang diterima **Parlementaria**, di Jakarta, Selasa (14/10)

Berdasarkan data paparan Bulog, jumlah penduduk Provinsi



FOTO: MUNICHEN/TEL

Jambi tahun 2025 mencapai sekitar 3,7 juta jiwa, dengan kebutuhan konsumsi beras sebesar 28.000 ton per bulan. Dari jumlah tersebut, Bulog berperan menyalurkan sekitar 5.000 ton per bulan melalui skema Cadangan Beras Pemerintah (CBP), atau setara 17 persen dari total kebutuhan konsumsi

beras di provinsi ini. Sisanya, sekitar 83 persen, dipenuhi oleh jaringan pedagang lokal dan pasar tradisional.

Kepala Kanwil Bulog Jambi, Ali Ahmad Bajih Amsari dalam paparannya menjelaskan bahwa hingga Oktober 2025, posisi stok beras mencapai 13.230 ton, terdiri atas 12.739 ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 491 ton beras komersial. Selain beras, stok komoditas strategis lain juga dalam kondisi aman, di antaranya jagung pipil 122.662 kg, gula pasir 38.551 ton, minyak goreng 160.370 liter, dan tepung terigu 1.710 kg.

“Kami memastikan stok pangan aman hingga akhir tahun. Bulog Jambi terus melakukan penguatan jaringan distribusi dengan menggandeng koperasi, distributor, serta pemerintah daerah. Kami juga memperluas layanan pangan murah dan memperkuat cadangan strategis di seluruh cabang,” ujar Kepala Kanwil Bulog Jambi.

**rnm/rdn**



Anggota DPR RI Rocky Candra



# Dukung Penguatan PKK dan Posyandu

**A**nggota DPR RI Novita Hardini mengunjungi Ananda Rifqi, Balita 1,5 Tahun Penderita Hidrosefalus asal Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Rifqi menderita Hidrosefalus, yang mana terdapat cairan di otak yang membuat otaknya tidak tumbuh kembang dengan baik dan berpengaruh pada fungsi-fungsi tubuh lainnya.

“Kalau dari saya mencoba memberikan yang terbaik terhadap potensi penanganan yang tepat untuk ananda Rifqi. Saya meminta juga untuk Tim Penggerak PKK dan juga RSUD untuk memitigasi untuk

beberapa resiko kedepannya. Sehingga kejadian seperti ini tidak terulang kembali di Kabupaten Trenggalek,” kata Novita didampingi Direktur RSUD dr Soedomo Trenggalek, usai mengunjungi Rifqi, Senin (13/10).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mengungkapkan kedepan, PKK diharapkan lebih giat lagi mensosialisasikan fungsi-fungsi seperti garam beryodium, asam folat dan yang lainnya yang memang harus dipenuhi di setiap ibu hamil. Terutama trimester I, umur 1, 2 dan 3 bulan. Kedua, lanjut Novita, peran posyandu harus dioptimalkan dalam memberikan pendidikan kesehatan

bisa menjangkau bagi semua masyarakat di masing-masing desa.

Lebih lanjut, ia juga meminta dilakukan sosialisasi pengecekan berkala pada ibu hamil dan pemanfaatan fasilitas di RSUD Kabupaten Trenggalek. “Kemudian juga saya berdoa khusus untuk ananda Rifqi, semoga diberikan

**Meminta juga untuk Tim Penggerak PKK dan juga RSUD untuk memitigasi untuk beberapa resiko kedepannya. Sehingga kejadian seperti ini tidak terulang kembali di Kabupaten Trenggalek**

keajaiban jalan yang bisa ditempuh untuk melakukan pengobatan yang terbaik,” tutup Legislator Dapil VII Jawa Timur itu. — **we/aha**



FOTO: IST/VEL

Anggota DPR RI Novita Hardini

Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya





**Wakil Ketua DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Gabungan DPR RI ke Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (15/10/2025). Ia menyebutkan provinsi ini sebagai salah satu kekuatan utama produksi pangan nasional.** Foto : Um/Aha





DOKUMENTER  
INVESTIGASI  
REFERENSI INDONESIA



**TVR**  
PARLEMEN

TRANSFORMASI SUARA DAPIL  
**AKSI DEWAN**  
MENDENGAR - MELIHAT - MEMBANGUN

**SAKSIKAN HANYA DI:**

<https://tvrparlemen.dpr.go.id>



TVR PARLEMEN

EXECUTIVE PRODUCER **MEIDI NUGROHO**  
PRODUCER **ADRIANUS SEPTIANTO** LINE PRODUCER **HERI HERYADI**



Sampaikan aspirasi Anda melalui  
SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344



DPR RI



DPR RI



@dpr\_ri



@dpr\_ri



@dpr\_ri



@dpr\_ri